STRATEGIMEMERANGI KEMISKINANDENGAN PENGEMBANGANEKONOMI LOKALPADAERA DESENTRALISASI

*by*PusatKarirUnitomo

Submissiondate:28-Jan-202010:13AM (UTC+0900)
SubmissionID:1239757242
Filename:PENGEMBANGAN_EKONOMI_LOKAL_PADA_ERA_DESENTRALISASI_turnitin.pdf(818.72K)
Wordcount:1405
Charactercount:9468

*Suyanto**

Abstract: The definition of poverty is considered in many points of view, as a consequence, the definition, couses and measurement of poverty indicator are deferent. Fighting poverty can be realized by the development of local conomic means, in forming corporation, from any one who has compentence for prevention of poverty which is based on basic principles in the success of local economic development, that are consistent decentmlization, good govemance, good corporate govemance, activity of pro-poor society, equality of gender, and cantinuai contraction.

The implementation of lcal economic development is done by forming interesting power of region trough stabilization of intestation climate and local economic dynamism, increasing to human resourse, promoting commodity, image, and superior product in region, forming the self power, that is diversification effort and tmnsformation of product, developing ability to business, increasing asset of economic resourse and developing social capital, and forming the power of comprtition in increasing of productivity, efficiency of resource of poor population to market, supporting continual of product and regional partnership.

Keyword: Kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, [redacted] daerah, [redacted] berbasis pro-penduduk miskin.

Pendahuluan

1. Latar Belakang Penelitian

Pandangan tentang pengertian kemiskinan memiliki multidefinisi. Kemiskinan selalu menjadi dilema, serta berbagai ragam penyebab dan akibat yang ditimbul-kannya. [redacted] dishibusi [redacted]

akes b;rrirrigasi berbagai daerah. Kondisi ini menyebabkan masyarakat setempat menjadi miskin. Berbagai upaya penEembang;:n ekonomi lokal masyarakat setempat harus dilakukan agar kemiskinan di daerah bisa dientaskan. Kebijakan otonomi daerah dan desenhalisasi fiskal diharapkan dapat memperluas ruang partisipasi publik didaerah, mulai peran serta . Melalui peningkatan partisipasi publik yang lebih baik diharapkan penggunaan anggaran sosial publik semakin pro-penduduk miskin (pro-Poor).

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, peneiitian disusun pengertian, penyebab serta indikator kemiskinan dipandang menumt beberapa pihak?

2. Bagaimana pengembangan ekonomi lokal harus dilakukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan pada pemerintah kabupaten/kota.

2. mengkaji secara konseptual pengertian kemiskinan, faktor-faktor penyebab, beberapa indikator kemiskinan, serta strategi yang dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan pada pemerintah kabupaten/kota. Tujuan lain penelitian ini adalah merangkaikan konsep pemikiran dalam pengentasan kemiskinan melalui melalui :

(daerah sebagaimana hasil penelitian Dendi dkk (2004) dalam penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTT dan NTB.

3. Manfaat Penelitian

1. Manfaat penelitian ini dapat diketahui beberapa pengertian kemiskinan, faktor-faktor penyebab, indikator, serta shategi yang dilakukan dalam

2. Dari penelitian ini dapat diketahui skategi pengembangan ekonom lokal melaiui : ( )serta (daerah dalam pengentasan kemiskinan pada pemerintah dari hasil penelitian Dendi dkk (2004) untuk kasus penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTT dan NTB.

Metode Penelitian

1.xJenis Penelitian

Penelitian ilmu sosial secara umum dikenal 3 (tiga) tipe peneliiian, yaitu penelitian eksploratif (exploratiue research), penelitian deskriptif (descriptiue raearch), serta penelitian penjelasan (explo natory research) Umumnya sebagian besar penelitian bersifat penelitian penjeiasan (explanatory penelitian rnengetahui . Penelitian sosial adalah bersifat deskriptif (descriptiue research), yaitu mengkaji dan menganalisis secara deskriptif mengenai variabel-variabel yang diteliti, sehingga penelitian deskriptif analitik adalah penelitian yang ditujukan pada pemecahan masalah dengan penekanan pada sfudi kasus. Atas dasar penjelasan tersebut, penelitian ini termasuk studi kasus menanggulangi kemiskinan dalam era otonomi dan desenfualisasi.

2. Rancangan penelitian

Menurut Zainuddin (2000) menganalisis unfuk (inshumen) pengambilan kesempatan . Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif uniuk mengkaji secara komprehensif menanggulangi kemiskinan melalui di

3. Teknik Pengumpukn dan Analisa Data

Data yang dlgunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dig"eroleh dari berbagai instansi terkait, seperti Badan Pusat Statistik, Bappeda, Jumal-Jumal ilmiah, buku-buku ilmiah serta hasil publikasi ilmiah lainnya. Data-data yang diambil dalam penelitian ini adalah semua eiata yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

4. Tempat & Waktu Penelitian

Penelitian ini difokuskan terhadap penganganan masalah kemiskinan pada kabupaten/kota di Jawa Timur semenjak pelaksanaan otonomi dan desentralisasi fiskal setelah diberlakukannya UU No. 22l 1999 & UU No. 251t999 yang direvisi menjadi uu No. 3212004 & UU No.33/2004. Upaya penanganan kemiskinan ini dapat dilakukan melalui pengembangan ekonomi lokal pada setiap kabupaten/kota.

Definisi, Faktor Penyebab dan Pengukuran Indikator Kemiskinan

1. Multidefinisi Kemiskinan

sehingga pandangan tentang kemiskinan sangat bervariasi. Setidaknya, kini banyak lembaga yang menangani kemiskinan, antara lain BPS, BKKBN, Bank Dunia. Menurut BPS, kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dari 2.100 kalori per kapita per hari. BKKBN melihat kemiskinan dari sudut pandang suatu keluarga miskin prasejahtera, yaitu, apabila : a). Tidak dapat melakanakan ibadah menurut agamanya b). Seluruh anggota keluarga tidak mampu makan dua kali sehari c). Seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di mmah, bekerja/sekolah dan bepergian d). Bagian terluas dari rumahnya berlantai tanah e). Tidak mampu membawa anggota
keluarga ke sarana kesehatan. Bank Dunia memandang kemiskinan karena keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan USD 1 per hari.

Secara lokal maupun nasional, kemiskinan mempunyai empat dimensi pokok, yaitu : (1) kurangnya kesempatan (lock of opportunity) ; (2) rendahnya kemampuan (low of capabilities); (3) kurangnya jaminan

(low-leuel of security); dan (4) ketidakberdayaan (row of capacity or empowerment).

Kuncoro (2000: 102-103), menyatakan, bahwa kemiskinan setidaknya dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu; pertama : Kemiskinan absolut yang diidentifikasikan berdasarkan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kedua; Kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain, kemiskinan relatif erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Berdasarkan pola waktunya kemiskinan dapat dibedakan menjadi: persistent pouerty, cyclical pouerty, seasonal pouerty, serla accidental pouerty. Persistent pouerty, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun. umumnya menimpa wilayah yang memiliki sumberdaya alam yang kritis dan atau terisolasi. cyclical pouerty, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan. Sementara ifu seosonol pouerty, yaifu kemiskinan musiman seperti yang terjadi pada usahatani tanaman pangan dan nelayan. Pola yang lain adalah accidental pouerty, yaitu kemiskinan karena terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijaksanaan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat
kesejahteraan suatu masyarakat.

2. Faktor Penyebab Kemiskinan

Belakangan ini banyak peneliti yang tertarik terhadap masalah kemiskinan dari berbagai latar belakang. Sudut pandang mereka bervariasi. sebagian peneliti menyatakan, bahwa penduduk miskin erat kaitannya dengan wilayah miskin, wilayah dengan potensi daerah yang tertinggal.

Peneliti lainnya mempunyai sudut pandang, bahwa terdapat kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Kemiskinan cultural mengacu kepada sikap masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh pembangunan yang belum seimbang dan hasilnya belum terbagi merata. Hal ini disebabkan oleh keadaan kepemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang, dan ketidaksamaan kesempatan dalam berusaha

dan memperoleh pendapatan akan menyebabkan kEikutsertaan dalam pembangunan yang tidak merata pula.

Secara umum penyebab kemiskinan dapat dikategorikan dalam tiga bentuk, antara lain: 1) Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan, peraturan maupun lembaga yang ada di masyarakat sehingga dapat menghambat peningkatan produktivitas dan mobilitas masyarakat. 2) Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang berhubungan dengan adanya nilai-nilai yang tidak produktif dalam masyarakat, tingkat pendidikan yang rendah, kondisi kesehatan dan gizi yang buruk; dan 3) Kemiskinan alamiah, yaitu kemiskinan yang ditunjukkan oleh kondisi alam maupun geografis yang tidak mendukung, misalnya daerah tandus, kering, maupun keterisolasian daerah.

3. Indikator Kemiskinan

Selama ini dalam mengukur kemiskinan sering dikaitkan dengan standar hidup yang absolut dari bagian masyarakat tertentu, sehingga ketimpangannya mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat.

Dari pandangan diatas, kemiskinan sering didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Hal ini menyiratkan tiga pertanyaan dasar, yaitu bagaimana mengukur standar hidup? apakah yang dimaksudkan dengan standart hidup minimum? Serta indikator sederhana yang bagaimana yang mampu mewakili masalah kemiskinan yang begitu rumit?

Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi (consumption based pouerty line) terdiri dari dua elemen, yaitu : (1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya; dan (2) jumlah kebutuhan lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Namun Headcount Index belum dapat mengatasi adanya kesenjangan kemiskinan pendapatan atau pouerty gop (Meier, 1995:26). Pouerty gop adalah menghihrng tuansfer yang akan membawa pendapatan setiap penduduk miskin hingga tingkat diatas garis kemiskinan, agar kemiskinan dapat dilenyapkan (Kuncoro, 2000: 104-105).

untuk mengidentifikasi kemiskinan sering menggunakan garis kemiskinan (pouerty /ine), yaitu suatu tolok ukur yang menunjukkan ketidakmampuan penduduk melampui ukuran garis kemiskinan atau suafu ukuran yang didasarkan pada kebufuhan atau pengeluaran konsumsi minimum, misalnya konsumsi pangan dan konsumsi nonpangan.

Strategi memerangi Kemiskinan dengan Pengembangan Ekonomi Lokal

Menurut (Dendi dkk, 2004), bahwa dalam penanggulangan kemiskinan setidaknya harus ada kebijaksanaan yang dituangkan dalam tiga arah kebijaksanaan. Pertamo, kebijaksanaan tidak langsung yang diarahkan kepada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya penanggulangan kem iskinan ; kedua, kebijaksanaan langsung yang ditujukan pada golongan masyarakat berpenghasilan rendah; ketiga, kebijaksanaan khusus yang dimakudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu sendiri dan aparat yang bertanggung jawab langsung terhadap kelancaran program menan ggulangi keryr iskinan.

Menurut Gtz, (2004),_menyatakan, bahwa pengembangan ekonomi lokalsetidaknya memiliki arah dan tujuan untuk mendorong ekonomi local agar tumbuh dan menciptakan tambahan lapangan kerja; mendayagunakan sumber daya lokalyang tersedia secara lebih baik; menciptakan ruang dan peluang untuk penyelarasan suplai dan permintaan, serta mengembangkan peluang-peluang baru bagi bisnis. Program pengembangan ini tentu saja membutuhkan sinergi dengan berbagai pihak yang kompeten dengan penanggulangan kemiskinan.

Beberapa prinsip dasar keberhasilan Pengembangan Ekonomi Lokal.

1. Pelaksanaan Desentralisasi yong konsisfen

Desentralisasi pemerintahan dapat dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan dari pembangunan daerah (Alisahbana, 2000). Bila otonomi daerah dibarengi dengan komibnen dan kebijakan deregulasi yang sehat, partisipasi masyarakat dalam pasar yang sesungguhnya akan meningkat dan menghasilkan nilai tambah yang bermanfaat bagi perbaikan kehidupan maupun ekonomi masyarakat.

Untuk menciptakan kebijakan deregulasi yang sehat, pemerintah daerah dan sektor swasta serta masyarakat harus mengintensifkan dialog, memberikan masukan kepada pemerintah pusat melalui jalur birokrasi maupun melalui piatform formal partisipasi publik yang ada maupun melalui media massa dan dialog-dialog informal stakeholder. Hal ini dapat dilakukan bila komunikasi tersebut dapat berjalan efektif.

2. Good Gouernance / Good Corporate Gouernance

Good gouemance (kepemerintahan yang baik) secara konsisten pada seluruh tingkatan adminishasi akan dapat menghasilkan pelayanan public yang efektif dan efisien, agar terhindar dari ekonomi biaya tinggi. Hal ini penting untuk menarik minat investor. Prinsip-prinsip good gouernance dalam pemerintahan daerah, yakni (1) partisipasi warga negara dalam proses penyusunan kebijakan; (2) penegakan hukum; (3) hansparansi; (4) pemerataan; (5) ketanggapan; (6) visi yang shategis; (7) akuntabilitas terhadap publik; (8) profesionalisme; (9) efisiensi dan efektivitas, artinya penggunaan sumberdaya secara optimal untuk pelayanan publik; dan (10) supervisi, yakni penerapan pengawasan yang lebih ketat terhadap administrasi publik dan pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan melibatkan para stokeholders. Kondisi ini dapat dilaksanakan bila kesadaran terhadap pembangunan ekonomi daerah tumbuh pada masyarakat (Kuncoro, 20M).

3. P ro -M osy ar akat Miskin

Program pengembangan ekonomi lokal haru9 mengutamakan partisipasi masyarakat miskin terutama kegiatan-kegiatan dalam rantai produki dan pemasaran, sehingga setidaknya tidak sekedar efek menetes- kebawah (trickl e-dow n et'f ectsl, agar kesej ahteraan masyarakat miskin meningkat.

Konsep pro-masyarakat miskin mementingkan prinsip pokok, pada:
(i) investasi pada peningkatan sumber daya manusia dan modal sosial penduduk miskin; (ii) keb{akan dan pelayanan yang menghasilkan tersedianya secara luas dan berkelanjutan kebutuhan dasar masyarakat (akses pangan, air bersih, perumahan, kesehatan dan pendidikan); (iii) kebijakan dan pelayanan yang mengurangi biaya-biaya transaksi sehingga membuka peluang bagi masyarakat miskin untuk memperoleh pekerjaan

dan/atau nilai tambah dari usaha sendiri; (iv) peningkatan akses masyarakat miskin kepada sumber daya ekonomi (modal, laharr/ ruang, sarana produki, informasi pasar, dan lain-lain); dan (v) pembangunan yang ramah lingkungan, yang memelihara atau bahkan memperbaiki fungsi ekologi dan kapasitas sumber daya alam untuk berproduki (Dendi dkk,2004).

4. KesetaraanGender

Pembangunan gender telah menjadi isu lintas sektor. salah satu fokus isu gender adalah pada kesetaraan akses dan konhol laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya ekonomi dan pasar tenaga kerja. Apapun inisiatif pengembangan ekonomi lokal, harus ditelaah terlebih dahulu manfaat atau kerugiannya baik bagi laki-laki maupun perempuan, contohnya adalah revolusi hijau (Dendi dkk, 2004)

5. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan menekankan kemanunggalan (inclusiueness) pembangunan ekonomi dengan pembangunan sosial dan kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan mengintegrasikan mekanisme pasar dengan kelembagaan (hukum / perundang-undangan, normasosial, reward dan sanksi) untuk membenfuk perilaku dan tindakan sektor publik, swasta dan non-pemerintah dalam mengelola pembangunan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang padat ilmu (kno urle dge-intensiue), yang mensubstitusi modal dengan ilmu. Penggunaan agen hayati (musuh alami) untuk pengendalian hama tanaman tertentu, yang menggantikan penggunaan pestisida, merupakan contoh kongkrit bagaimana ilmu menggantikan modal. Pembangunan berkelanjutan sangat menekankan pentingnya pembangunan hemat sumber daya dan energi, sehingga penggunaan energi yang dapat diperbaharui (renewable energy) serta konservasi sumber daya alam perlu diintensifkan.

Komponen Pokok Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Lokal

1. Membangun Daya Tarik

Membangun daya tarik investasi dan bisnis di daerah setidaknya terdapat

tiga komponen strategis yang harus diperhatikan, yaitu penyehatan iklim inrrestasi dan dinamisme ekonomi daerah, keberadaan dan citra komoditi /produk unggulan, serta ketersediaan tenaga kerja yang kompetitif (sumber daya manusia). Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a).Penyehatan Iklim Investasi dan Dinamisme Ekonomi Daerah

Dalam pengembangan ekonomi lokal, pembuat kebijakan dan masyarakat seternpat harus memaharni faktor-faktor yang menenfukan sehat atau tidaknya iklim bisnis menurut kacamata investor atau pengusaha, agar kebijakan maupun pelayanan dapat diarahkan untuk menciptakan kondisi-kondisi tersebut.

Faktor biaya; Kebijakan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggiakan mengganggu minat investor melakukan ekspansi bisnis, serta membatasi partisipasi penduduk miskin pada pasar. Kondisi yang dapat menunjang minat investor unfuk melakukan investasi di daerah, yakni (i) sistem perizinan dan perpajakan yang transparan dan efisien; (ii) tersedianya infrastruktur (hansportasi, telekomunikasi, energi dan air) yang efisien dan cukup; (iii) tenaga kerja lokal yang kompetitif; dan (iv) citra dan persepsi budaya good gouernance.

Faktor dinamisme ekonomi, bahwa kebijakan desentralisasi yang diiringi dengan deregulasi yang kohesif akan mendukung mekanisme pasar sehingga dapat menjadi daya tarik, daya tahan maupun daya saing ekonomi daerah. Jadi investor akan melihat faktor penunjang keberhasilan bisnisnya yang merupakan faktor dinamisme ekonomi daerah, yang memiliki kriteria berupa: (i) potensi ekonomi dan (ii) struktur ekonominya. Kriteria yang pertama biasanya menggunakan indikator produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita karena indikator tersebui mencerminkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. I{riteria kedua, yakni skuktur ekonomi, menggunakan indikator nilai tambah bruto seluruh sektor kegiatan ekonomi (nilai tambah sektoral) yang terdapat di daerah. Investor akan dapat melihat potensi unggulan (basis ekonomi), sekaligus pengalaman daerah, apakah pada sektor primer, sektor sekunder (indushi) atau pada sektor jasa.

b). Peningkatan Sumber Daya Manusia

Ketersediaan tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan dunia usaha adalah faktor penting daya tarik investasi di daerah. Namun kualifikasi saja tidak cukup. persaingan mengutamakan produktifitas dan efisiensi. Konsekuensinya, tingkat upah/kebijakan upah juga menjadi penenfu daya tarik investasi. peningkatan sumber daya manusia dapat ditempuh melalui jalur pendidikan formal, jalur pendidikan inform aVpelatihan kej uruan (u o utional training) .

c). Mempromosikan Citra Komoditi dan produk Unggulan Daerah

Berbagaiproduk unggulan harus dipacu pertumbuhannya agar bisa menjadi trade mork bagi daerah. Hal ini pada akhimya dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat daerah. untuk penciptaan daya tarik (investasi) di daerah, penting diperhatikan tidak saja komoditi / produk dan jasa apa yang dapat menjadi unggulan daerah tetapi juga ciri khas apa yang bisa dijadikan citra (disfinctiue competitiueness) dari komoditi / produk maupun jasa tersebut. Prinsip pengembangan ekonomi lokal yang pro-Wor, pemilihan produk unggulan menggunakan potensi nilai tambah langsung suatu komoditi / produk bagi keluarga miskin sebagai kriteria penting, disamping kriteria kelayakan teknis, permintaan pasar, serta efek multiplier suatu komoditi / produk sektoral terhadap sektor usaha lainnya. Hal ini tidak berarti bahwa hanya komoditi atau produk yang telah ada sekarang ini yang dapat dijadikan unggulan daerah. Komoditi baru yang potensial diadopsi, serta berpotensi menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah maupun masyarakat miskin dan lingkungan, dapat dikembangkan sebagai unggulan daerah.

Membangun Daya Tahan

Konsep daya tahan (resilience) diadopsi dari pemikiran para ahli tekologi yang melihat ekonomi sebagai satu ekosiste m (ecologiml nation) yang berusaha memalsimalkan nilai jangka panjang dari sumber daya lahan yang terbatas dengan mengembangkan sistem-sistem berbasis hayati yang saling bergantung (interdependence) . Keanekaragaman dan kesalingterganfu ngan spesies dan lingkungan merupakan faktor penting unfuk membangun

produktivitas dan daya tahan sistem dalam jangka panjang.

Daya tahan (resilience) merupakan konsep yang dinamis, dan secara sederhana dapat dijelaskan bahwa bahwa daya tahan ekonomi merupakan daya menyesuaikan diri serta memulihkan diri sektor ekonomi dari tekanan- tekanan faktor ekonomi maupun non-ekonomi dalam lingkungan yang senantiasa berubah dimana peluang dan resiko dapat muncul setiap saat, setiap unit ekonomi baik rumah tangga, perusahaan maupun daerah, perlu mempersiapkan diri.

a).Diversifikasi Usaha dan Tiansformasi Produk

Diversifikasi mencakup penganekaragaman jenis komoditi maupun penganekaragaman bidang usaha (entreprise), sedangkan transformasi produk dalam artian sempit merupakan perubahan bentuk atau struktur produk. Diversifikasi maupun transformasi produkdiharapkan; (i) agar pengusaha mikro dan kecilmenengah (UMKM) maupun sektor swasta di daerah mampu meminimalkan resiko kegagalan secara umum; (ii) mempertahankan diri dari ancaman produk luarmaupun produk substitusi yang masuk pasar; dan (ii) menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah bagi masyarakat lokal khususnya dan perekonomian daerah umumnya. Pilihan diversifikasi atau hansformasi produk atau bahkan kombinasi keduanya seyogyanya mempergunakan kriteria teknis dan non-teknis, antara lain: (i) faktor kesesuaian dan resiko alami yang sulit dikontrol petani/pengusaha (iklim, hama penyakit) ; (ii) keseimbangan permintaan dan penawaran, termasuk kaitannya dengan skala ekonomi; (iii) kapasitas dan prioritas rumah tangga tani (pengusaha); (iv) kebudayaan setempat.

b). Pengembangan Kewirausahaan

Kewirausahaan merupakan mengeksploitasi inovasi untuk menciptakan nilai yang tidak bip selalu diukur dengan ukuran-ukuran keuangan saja (Wickham, 2001). Wirausahawan sangat peduli dengan potensi unfuk berubah. Potensi untuk berubah tersebut berada pada tiga dimensir(Wickham, 2001) yakni (i) dimensi keuangan (potensi menciptakan nilai baru); (ii) dimensi personal (potensi mencapai tujuan- tujuan personal, tidak hanya uang semata); dan (iii) dimensi sosial (potensi melakukan perubahan sbuktural).

upaya-upaya ini akan menjadi bagian integral dari strategi

pengembangan ekonomi lokal, yaitu: (i) Membangun budaya demokrasi untuk meningkatkan efektifitas partisipasi dan daya tawar perorangan maupun kolektif (collectiue bargaining power) dalam segala bidang, meliputi ekonomi, sosial budaya dan politik. (ii) pemerintah mengembangkan struktur dan fasilitas untuk meningkatkan akses masyarakat kepada informasi dan kemampuan menganalisa informasi ekonomi dan bisnis, sehingga sumber daya yang terbatas dapat dipergunakan secara tepat dan efisien, serta (iii) Mendukung perubahan struktur pemasaran untuk menciptakan rantai suplaiyang lebih kompetitif dan efisien. Salah satu peluang penting dalam hal ini adalah membentuk organisasi-organisasi produsen, misalnya asosiasi, koperasi atau model - model lain yang sesuai dengan kerangka legal formal yang berlaku.

c). Peningkatan Akses Sumber Daya Ekonomi dan Pengembangan
Modal Sosial

1).Akses pada Lahan dan Ruang

Kepemilikan lahan yang relatif sempit, merupakan salah satu faktor pembatas utama penciptaan skala ekonomi dan nilai tambah di pedesaan.

2). Peningkatan Ketersediaan Modal yang Terjangkau

Untuk meningkatkan akses modal bagi pelaku UMKM dan masyarakat miskin dapat dilakukan beberapa strategi, antara lain :

a). Modal dana bergulir (revolving fund).

Dewasa ini beberapa organisasi pemerintah maupun non- pemerintah telah menempkan konsep reuoluingfund dengan tingkat keberhasilan yang sangat beragam. Dana bergulir ini diserahkan kepada kelompok-kelompok masyarakat miskin atau kelompok usaha mikro untuk memulai maupun mengembangkan usaha produktif. Secara konseptual dana bergulir akan digulirkan kepada kelompok lain dalam desa yang sama. Agar perguliran dana benar- benar berjalan secara efektif dan efisien, perlu dirumuskan konsep kepemilikan yang jelas, serta diciptakan strukturkelembagaan yang akan mengelola perguliran dana tersebut.

b). Menjembatani hubungan kelompok dengan Bank.

Strategi ini direaiisasikan melalui pengembangan dan

pemberdayaan lembaga-lembaga keuangan perantara (intermediary institution). Model kelembagaan yang sesuert dengan kerangka legal formal yang ada sekarang ini adaiah Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi Serba Usaha yang memiliki unit usaha simpan pinjam. Lembaga-lembaga dapat memperoleh kredit dari sektor perbankan dan kemudian menyalurkannya kepada anggota-anggotanya atau para nasabahnya dengan bunga komersial, tetapi dengan persyaratan yang lebih flekibel.

3). Pengembangan Modal Sosial

Dewasa ini konsep modal sosial semakin populer. Lembaga- lembaga internasional, misalnya Bank Dunia telah mengakui pentingnya modal sosial dalam pembangunan berkelanjutan. Beberapa dimensi penting dari modal sosial sangat relevan dalam konteks pengembangan ekonomi lokal, yaitu : (i) norma-norma sosial dan agama yang secara turun-temurun telah membentuk pandangan, perilaku (moral) dan tindakan masyarakat; (ii) jaringan kerj a (netuorks) yang dibentuk dan dipelihara oleh masyarakat untuk mengatasi berbagai persoalan yang mereka hadapi dengan prinsip tolong menolong, dan saling menghargai; (iii) kesalingpercayaan (trust) anggota masyarakat yang terbentuk dalam proses interaksi sosial.

Membangun Daya Saing

Membangun daya saing berhubungan erat dengan stategi membangun daya tarik dan daya tahan. Keberhasilan skategi membangun daya tarik dan daya tahan bisnis dan ekonomi merupakan prasyarat bagi keberhasilan strategi membangun daya saing.

a). Peningkatan Produktifitas

Efisiensi sumber daya si miskin menuju pasar Kegiatan ini dapat dilakukan dengan pendekatan "padat karya" yang mengintegrasikan konsep "food-t'or-work" dan aktifitas simpan pinjam kelompok. Hasil tabungan mereka dapat membeli peralatan pertanian untuk menunjang kegiatan tani, dan hasilnya dapat dijual ke pasar. Kegiatan ini meski relatif kecil, narnun merupakan program pembangunan yang pro -poor.

b). Mendukung Keberlanjutan Inovasi Produk Unggulan

Pemerintah daerah harus menjembatani keterkaitan rantai suplai (supply chainlinkages), antara konsumen dengan produsen, dengan cara: (i) Menyediakan secara luas kepada produsen hasil-hasil studi pasar domestik maupun pasar luar negeri; (ii) Mendukung promosi dan/atau atau integrasi produk baru ke pasar, baik pasar lokal-regional maupun pasar luar negeri.

c). Kemitraan Regional

Konsep regional management adalah mengintegrasikan wilayah administrasi menjadi wilayah ekonomi dalam suatu wadah kerjasama stakeholders antar daerah dibidang kebijakan ekonomi, komunikasi informasi, serta kerjasama pemasaran (regional markefing). Untuk itu dengan diberlakukannya UU No. 3212004 pemerintah daerah telah diberikan wewenang yang luas untuk mengatur kegiatan pembangunan ekonominya (Dendi, 2004).

Penutup

Kesimpulan

Kemiskinan dapat dipandang menurut berbagai pihak, sehingga pandangan tentang kemiskinan, baik pengertian, penyebab dan indikator kemiskinan sangat bervariasi. Menurut BPS, kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang hanya dapat memenuhi makanannya kurang dan 2-700 kalori per kapita per hari. BKKBN melihat kemiskinan dari sudut pandang suatu keluarga miskin prasejahtera. Bank Dunia memandang kemiskinan karena keadaan tidak tercapainya kehidupan yang layak dengan penghasilan USD 1 per hari. Begitu juga pandangan lainnya bisa berbeda.

Saran-Saran

Perlu diupayakan konsep pengembangan dana bagi hasil antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah desa berdasarkan kriteria-kriteria kebutuhan pembangunan dengan memperhatikan keberadaan masyarakat miskin serta kinerja pemerintahan desa.

Pengembangan pendekatan diatas diharapkan dapat memperluas partisipasi masyarakat di tingkat desa dalarn merencanakan dan

melakanakan sendiri program-program pembangunan agar mereka keluar dari kemiskinan. Konsep ini sesuaiUU No. 32 Tahun 2004 Pasal 272 ayat3 yang [redacted].

DAFTAR PUSTAKA

Agustino L, Erlangga, 2005, Kineqakeuangan dan strategipembangunan [redacted] kosus [redacted] Suraboyo. [redacted] Univ. [redacted].

Ahmad, Jamaludin, 7990. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Daerah; Kosurs di Aceh, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Disertasi (tidak dipublikasikan), Program Pascasarjana UGM, Yogyakarta.

Alisyahbana. Armida S, 2000, "Desentralisosi Fiskol dan Kebijakan Pemban gunan Ekonomi Daerah", Makalah, D isaj ikan dalam konggres ISEI tanggal22 April2000 di Makassar.

Ananda, Candra Fajri,2002. "Problem of the Implementation of t'iscal Decentralbation in Regonal Autanomy: th Case of Malang Municipality and Tienggalek District". UsAID/Indonsia. [redacted] Institutional [redacted]. PEG project.

[redacted] M, Richard [redacted], Desentralisosi Fiskol di Negara- Negoro Berkembang, PL Gramedia Pustaka Utarna, Jakarta.

[redacted]-Afuran [redacted] International [redacted] Informal Sectar ([redacted].

Boediono, 7999, kori Pertumbuhan Ekonomi Pembangunon, Cetakan keenam, Penerbit BPFE , Yogyakarta. [redacted] Desenkalisasi [redacted] 2A02,11 Pebruari 2002. [redacted], BinderB, [redacted], I9&S, [redacted]

Daerah di Indonesio, UI press, Jakarta.

, 7989, " Indonesia"

Indonesio.

UGM. Yogjakarta. . Ret'ormasi:

UGM. Yoglakarta.

Dendi, A., Heile, J.H., Mahman dkk, 2A04, Menanggulangi Kemiskinan Melalui Pengembangan. Ekonomi Lokal, Kerjasama Departemen Dalamnegeri Dirjen Bina Pembangunan Daerah dengan gb Deutsche G esellschaft furTechnische Zusammernabeit (GTZ) GmBH.

, Yogyakarta.

Hirawan, Susijati , 1986. "AnalisaTbntang Keuangan Ekonomi Keuangan Indonesia", XXXry , Jakarta. IND EE 2003. Pertumbuhan Tbnp a D aya S ain g. Laporan pertengahan tahun. Indef, Jakarta.

& 1997, Negoro , Cetakan 2,Penerbit Rajawali, Jakarta.

Workhop Desenhalization. .

Khusaini, Moh, 2006, Kajian Desenbalisasi fisiensi), isertasi Universitas Brawijaya (dipublikasikan).

. N'iodel . Jakaria.

Semeru. Desentralisosi don Kinerla : Kosus , Nuso Gnggora Semeru. :llwww.gtxtdm. .idl.

Lembaga Penelitian Semeru .2A02. Mencari Alternatit' PenyempurnaonKebijakan Desentralisosi don Pelaiaran .

Mangkoesoebroto, Guritno, 1988, Ekonomi Publik, Suotu Anolisis koritis, PAU Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

_____2001. Ekonomi Publik. Edisi 3. BPFE. Yogyakarta.

. Anolisis . 3L (4):422'435.

Majidi, 7997, LPES, .

.

STRATEGIMEMERANGIKEMISKINANDENGAN PENGEMBANGANEKONOMILOKALPADAERA DESENTRALISASI

ORIGINALITYREPORT

18%	15%	4%	8%
SIMILARITYINDEX	INTERNETSOURCES	PUBLICATIONS	STUDENTPAPERS

PRIMARYSOURCES

1	www.gtzpromis.or.id InternetSource	6%
2	ejurnal.unikarta.ac.id InternetSource	3%
3	repository.usu.ac.id InternetSource	2%
4	id.scribd.com InternetSource	2%
5	rikaniacewau.blogspot.com InternetSource	2%
6	repository.unitomo.ac.id InternetSource	1%
7	ejurnal.mercubuana-yogya.ac.id InternetSource	1%
8	media.neliti.com InternetSource	1%
9	journal.feb.unmul.ac.id InternetSource	1%

1	SubmitedtoUniversitas17Agustus1945 Surabaya StudentPaper	1%
11	journal.unair.ac.id InternetSource	1%
12	ejournalunigoro.com InternetSource	1%
13	jurnaljam.ub.ac.id InternetSource	1%
14	pt.scribd.com InternetSource	1%
15	thesis.binus.ac.id InternetSource	1%
16	fe-akuntansi.unila.ac.id InternetSource	1%
17	www.dangroup.co.id InternetSource	1%
18	id.123dok.com InternetSource	1%
19	SubmitedtoSriwijayaUniversity StudentPaper	1%

Excludequotes Of

Excludematches Of

Excludebibliography Of

STRATEGIMEMERANGIKEMISKINANDENGAN PENGEMBANGANEKONOMILOKALPADAERA DESENTRALISASI

PAGE1

PAGE2

PAGE3

PAGE4

PAGE5

PAGE6

PAGE7

PAGE8

PAGE9

PAGE10

PAGE11

PAGE12

PAGE13

PAGE14

PAGE15

PAGE16

PAGE17

PAGE18